

**Sinergitas Potensi Ekonomi Di Pulau Jawa
Pasca Pandemi Covid-19
*Synergy Of Economic Potential in Java Island
Post Covid-19 Pandemic***

Sulistianingsih
Puslatbang PKASN LAN

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai pemulihan sektor ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid-19, karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian secara mikro maupun secara makro. Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat melakukan perbaikan terhadap sektor-sektor prioritas untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Sehingga disusunlah penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis sinergitas potensi ekonomi di pulau Jawa pasca pandemi Covid-19, dan hal tersebut dapat dianalisis melalui sektor basis ekonomi apa saja yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia pasca Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif, dengan alat analisis yang dipakai adalah analisis *Location Quotient (LQ)*. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui kontribusi sektor basis terbesar ada di pulau Jawa, sehingga diperlukan sinergitas sektor basis di setiap provinsi di pulau Jawa guna meningkatkan perekonomian pasca pandemi Covid-19 di Indonesia. Kontribusi Produk Domestik Bruto menurut Pulau Tahun 2021 masih ditopang dan didominasi oleh Pulau Jawa yaitu sebesar 57,89%. Sektor unggulan berupa jasa perusahaan di Provinsi DKI Jakarta, industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, serta real estate di Provinsi Banten. Sektor basis tersebut diharapkan mampu merangsang pertumbuhan sektor non basis sehingga menjadi sektor potensial, sehingga pada akhirnya semua sektor ekonomi bersama-sama mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus mulai mengembangkan kembali sektor non basis. Diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta. Sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Banten. Terakhir, sektor pengadaan listrik dan gas di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Potensi ekonomi, sektor basis, sektor non basis, PDB, dan PDRB

ABSTRACT

This article discusses the recovery of the economic sector in Indonesia after the Covid-19 pandemic, because it has had a huge impact on the economy on a micro and macro basis. It is time for the central and regional governments to move quickly to make improvements to priority sectors to restore the Indonesian economy. So this research was compiled with the aim of analyzing the synergy of economic potential on the island of Java after the covid-19 pandemic, and this can be analyzed through which economic base sectors can improve Indonesia's economy post-covid-19. The research method used is through a quantitative approach, with the analytical tool used is Location Quotient (LQ) analysis. From the results of the research conducted, it can be seen that the largest contribution of the base sector is on the island of Java, so that the synergy of the base sector is needed in every province on the island of Java to improve the economy after the Covid-19 pandemic in Indonesia. The

contribution of Gross Domestic Product by Islands in 2021 is still supported and dominated by Java Island, which is 57.89%. Leading sectors include corporate services in DKI Jakarta Province, manufacturing industry in West Java and Central Java Provinces, provision of accommodation and food and drink in DI Yogyakarta and East Java Provinces, and real estate in Banten Province. The base sector is expected to be able to stimulate growth in the non-base sector so that it becomes a potential sector, so that in the end all economic sectors together support increased economic growth in Indonesia. For this reason, the government must begin to redevelop the non-base sector. Among them are the agriculture, forestry and fisheries sectors in DKI Jakarta Province. Mining and quarrying sector in West Java Province, DI Yogyakarta Province, and Banten Province. Finally, the electricity and gas procurement sector in Central Java and East Java Provinces.

Keywords: *Economic potential, basic sector, non-base sector, GDP, and GRDP*

A. Pendahuluan

Dampak pandemi Covid-19 sangat besar terhadap kesehatan masyarakat, bahkan berpengaruh juga bagi perekonomian secara mikro (rumah tangga) maupun secara makro (regional dan nasional). Tak dapat dipungkiri, dampak pandemi Covid-19 ditandai dengan ekonomi yang melambat dan sistem keuangan yang memburuk akibat penurunan aktivitas ekonomi domestik. Sudah saatnya pemerintah baik pusat maupun daerah bergerak cepat merespon pandemi dengan menggenjot sektor-sektor prioritas untuk menopang perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional (Pratiwi, 2022).

Jauh sebelum adanya pandemi, masalah perekonomian sudah diatur dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang merupakan sebuah langkah besar pemerintah dalam mencapai visi Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang menjadi arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga tahun 2025. Latar belakang dari Perpres tersebut tersirat kekhawatiran bahwa tantangan pembangunan ekonomi Indonesia tidak mudah diselesaikan karena mengharuskan untuk senantiasa siap terhadap perubahan.

Dan betul saja terjadi, pada Maret tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi covid-19 yang tidak pernah terduga sebelumnya sehingga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Upaya MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

Ekonomi Indonesia mengalami penguatan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,69%, padahal sebelumnya sempat mengalami resesi. Keberhasilan lepas dari resesi tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi sehingga pemulihan ekonomi Indonesia relatif cepat. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) cukup efektif dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam laporan perekonomian Indonesia 2022, kontribusi Produk Domestik Bruto menurut Pulau Tahun 2021 masih ditopang dan didominasi oleh Pulau Jawa.

Lebih lengkapnya mengenai hasil tersebut sebagai berikut:

Tabel 1
Kontribusi dan Pertumbuhan PDB Menurut Pulau Tahun 2021 (persen)

No	Pulau	Kontribusi	Pertumbuhan
1.	Jawa	57,89	3,66
2.	Sumatera	21,70	3,18
3.	Kalimantan	8,26	3,18
4.	Sulawesi	6,89	5,67
5.	Bali dan Nusa Tenggara	2,78	0,07
6.	Maluku dan Papua	2,49	10,09

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2022

Selain itu, dari keseluruhan pulau yang ada di Indonesia, Pulau Jawa sangat banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri di Indonesia yaitu sebesar 57,89%, walaupun pertumbuhan ekonomi didominasi oleh Maluku dan

Papua yaitu 10,09%. Berikut data yang menjadi indikasi keberhasilan Pulau Jawa menjadi salah satu bagian terbesar dalam kemajuan industri nusantara:

Tabel 2
Jumlah Industri Pengolahan Besar dan Sedang, Jawa dan Luar Jawa, 2017-2019

Lokasi	2017	2018	2019
Jawa	27.417	24.489	24.201
Luar Jawa	6.160	5.626	5.871
Jumlah	33.577	30.115	30.072

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel 2, industri besar dan sedang (IBS) di Jawa dan luar Jawa, dimana jumlah IBS terkonsentrasinya di Pulau Jawa sejumlah 27.417 unit pada tahun 2017. Dan terjadi penurunan menjadi 24.201 unit pada tahun 2019. Total Industri besar dan sedang pada tahun 2017-2019 dengan jumlah 76.107 unit berada di Provinsi Jawa lebih banyak dibandingkan IBS yang berada di luar Pulau Jawa yaitu 17.657 unit. Hal itu menjadi indikasi bahwa Pulau Jawa merupakan daerah Industri terbesar.

Pulau Jawa merupakan pulau strategis yang ada di Indonesia. Walaupun luasnya hanya 6,76% dari luas Indonesia, namun letak geografis pulau Jawa yang strategis dengan berbagai potensi yang dimiliki, menjadikan pulau Jawa dipandang mampu untuk menjadi daerah terunggul di Indonesia dalam sektor industri pengolahan. Pusat pemerintahan Negara RI yang saat ini masih berada di pulau Jawa, maka industri dan perdagangan cepat berputar sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi yang relatif lebih cepat.

Perkembangan industri pengolahan di pulau Jawa dapat menjadi faktor dominan dalam memacu dan mengangkat pembangunan sektor lainnya. Peningkatan produktivitas industri pengolahan diharapkan dapat memacu produktivitas dari sektor-sektor yang lain sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan banyaknya jumlah industri pengolahan besar dan sedang, maka pulau Jawa dapat menjadi suatu kawasan industri, yang manfaatnya bukan hanya untuk wilayah pulau Jawa saja, tapi dampak luasnya dapat memberi keuntungan bagi Indonesia. Hasil produksi industri pengolahan besar dan sedang dapat diekspor sehingga menghasilkan pemasukan bagi Indonesia berupa devisa negara, sehingga

menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif.

Sektor industri pengolahan, terutama pengolahan non migas merupakan sektor utama yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, selama 2017-2021 kontribusi industri pengolahan selalu berada di posisi puncak dengan persentase di atas 20%. Pulau Jawa merupakan salah satu provinsi yang menyumbang PDB Indonesia di sektor industri pengolahan terbesar, terutama pengolahan non migas (2017-2021), yaitu sebesar 18,83%.

Kegiatan pembangunan sektor basis menurut lapangan usaha yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk menganalisis potensi sektor ekonomi apa yang potensial, agar potensi unggulan dan kelemahan di suatu wilayah dapat dikembangkan sehingga mendorong sektor-sektor yang lainnya.

Salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan adalah membangun perekonomian wilayah tersebut agar memiliki daya saing yang tinggi agar terus tumbuh dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain. Dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan berbagai kriteria khusus dalam menentukan sektor-sektor basis atau sektor unggulan. Sektor basis menjadi tumpuan utama dalam pembangunan ekonomi wilayah karena sektor ini dapat menghasilkan pendapatan baik daerah sendiri maupun dari daerah lain.

Teori ekonomi basis mengklasifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Yang dimaksud kegiatan basis adalah kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor keluar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional

(Elsjamina, 2014) dalam Hutapea, A. et al (2020).

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sinergitas potensi ekonomi di pulau Jawa pasca pandemi Covid 19. Hal tersebut dapat dianalisis melalui sektor basis ekonomi apa saja yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia pasca Covid-19. Dan sektor non basis apa yang dapat ditingkatkan oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Dari pernyataan tersebut, diperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana peranan industri pengolahan non migas terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Pulau Jawa?
2. Sektor PDRB menurut lapangan usaha manakah yang merupakan sektor basis di Pulau Jawa?
3. Bagaimana kontribusi sektor basis yang ada di pulau Jawa terhadap peningkatan nilai ekspor di Indonesia?

Sehingga diperoleh pertanyaan penelitian mengenai bagaimana sinergitas potensi ekonomi di Pulau Jawa Pasca Pandemi Covid-19? Itulah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia yang harus segera diselesaikan, dan dicari solusinya agar perekonomian Indonesia dapat bangkit kembali seperti sebelum pandemi, bahkan jauh meningkat dibandingkan dengan sebelum pandemi.

C. Metode Penelitian.

Data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pulau Jawa diperoleh melalui web Badan Pusat Statistik dengan tahun pengamatan 2021, sesuai dengan ketersediaan data terakhir. Data PDB Indonesia dan PDRB pulau

Jawa berdasarkan Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 2010.

Alat analisis yang dipakai untuk menjawab tujuan adalah Analisis *Location Quotient (LQ)* yaitu perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah terhadap besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional (Tarigan, 2014: 82).

Analisis Location Quotient (LQ) umumnya dipakai untuk melihat perbandingan regional dengan nasional. Regional adalah daerah yang lebih sempit, sementara itu Nasional adalah daerah yang lebih luas. Misalnya: Regional (Provinsi Jawa Barat) dengan Nasional (Indonesia).

Aturan main dari *Location Quotient (LQ)* adalah (Tarigan, 2014: 82-83):

- a). $LQ > 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih besar di daerah daripada nasional.
- b). $LQ < 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih kecil di daerah daripada nasional.
- c). $LQ = 1$, artinya peranan sektor tersebut sama baik di daerah ataupun secara nasional.

Mirip dengan pernyataan di atas, aturan main dari *Location Quotient (LQ)* adalah (Putra, 2011: 168) dalam Adi, L (2017):

- a). $LQ > 1$, berarti mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor pada sektor tersebut (*Relative Spezialization in Sector*). Ekspor dilakukan karena adanya surplus.
- b). $LQ < 1$, berarti mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor (*Production Deficit in Sector*). Impor dilakukan karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut.
- c). $LQ = 1$, berarti produktivitas sektor tersebut berimbang. Artinya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu saja sehingga masih belum layak untuk diekspor

(Average Production in Sector) Location Quotient (LQ).

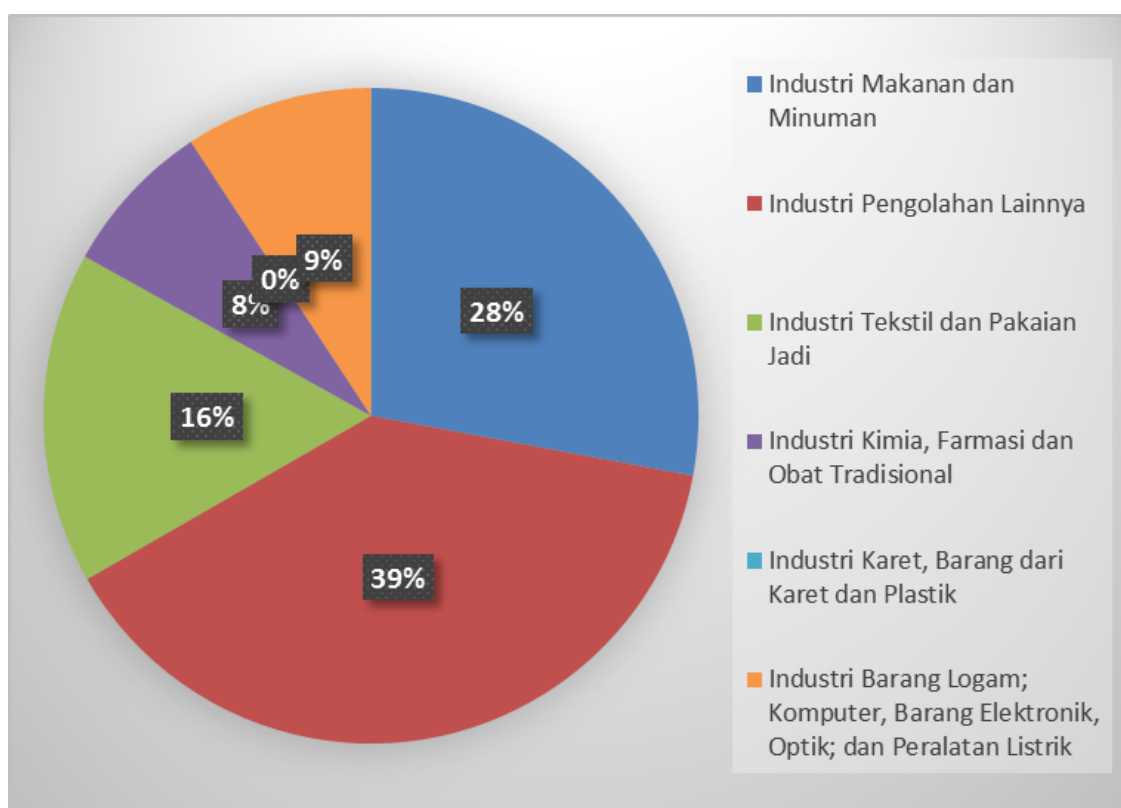
D. Pembahasan

1. Peranan Industri Pengolahan Non Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Pulau Jawa

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling) (BPS).

Peran sektor industri pengolahan pada pembentukan PDB Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 19,70 persen pada tahun 2019 (Laporan Perekonomian Indonesia 2022). Aktivitas di sektor-sektor lain akan turut meningkat seiring berkembangnya sektor industri. Bahan baku baik dari sektor pertanian maupun dari sektor lainnya, termasuk hasil dari sektor industri itu sendiri dibutuhkan sebagai bahan pasokan sektor industri. Naik turunnya sektor industri akan mempengaruhi sektor lainnya. Industri yang berkembang di Pulau Jawa sebagian besar adalah makanan dan minuman, berjumlah 7.263 unit usaha (Gambar 1). Selain itu industri tekstil dan pakaian jadi jumlahnya cukup besar juga yaitu sebanyak 4.259 unit usaha, disusul industri karet, barang dari karet dan plastik sebanyak 2.518 unit usaha.

Gambar 1
Komposisi Jenis Industri Besar dan Sedang
di Indonesia Tahun 2020



Sumber : BPS (data diolah)

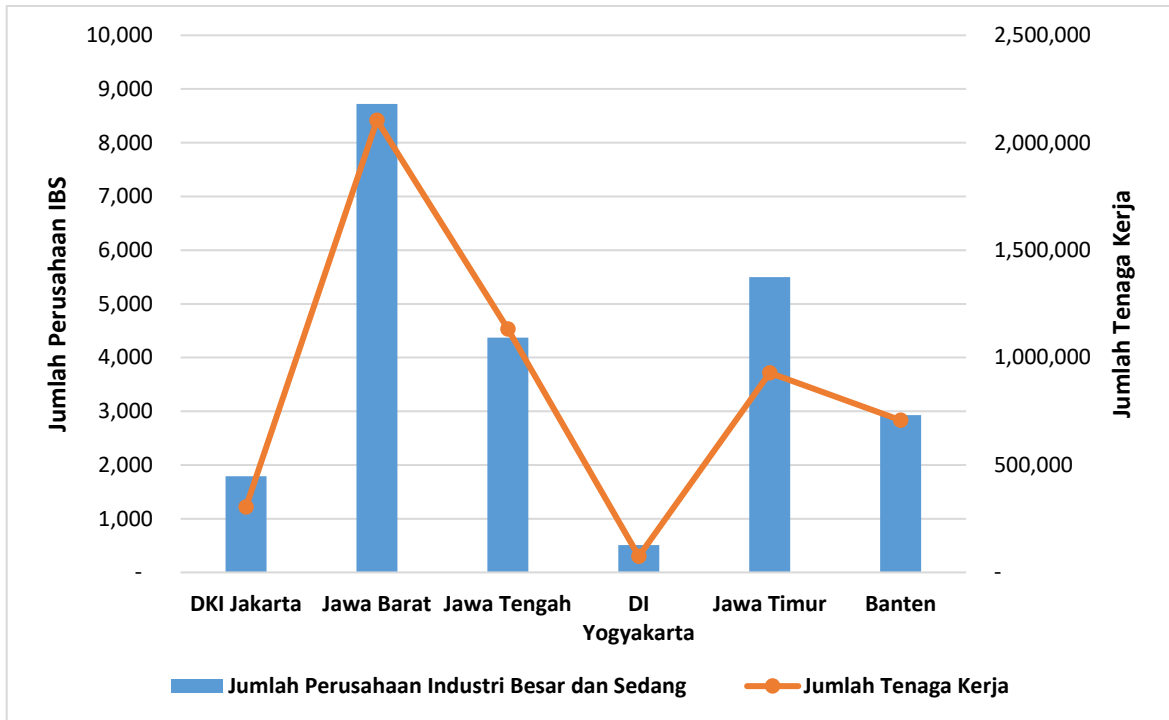
Industri pengolahan non migas (manufaktur) ini adalah kelompok sektor sekunder yang menjadi penopang bingkai perekonomian agar Indonesia menjadi negara maju, karena industri ini merupakan salah satu penopang perekonomian yang dianggap tangguh. Keberadaan dan keberlanjutan industri manufaktur memegang peranan yang kuat karena mengakar di masyarakat. Tidak hanya konsumen, optimisme juga ditunjukkan oleh para pelaku usaha. Purchasing Managers' Index (PMI) yang menunjukkan optimisme pelaku bidang usaha manufaktur terhadap prospek perekonomian ke depan, sejak akhir tahun 2021 bernilai lebih dari 50 yang artinya sektor industri sedang bergerak ekspansif. Sebelumnya,

pada kuartal 3 2021 kinerja industri manufaktur sempat tertahan oleh adanya gelombang virus varian delta yang diindikasikan dengan nilai PMI manufaktur dibawah 50 (Laporan Perekonomian Indonesia 2022).

Sektor industri manufaktur, baik Industri Besar Sedang (IBS) maupun Industri Mikro Kecil (IMK) perannya tidak begitu besar dalam pembentukan ekonomi daerah, namun berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan (BPS, 2015). Jumlah unit usaha pada sektor industri besar dan sedang di Pulau Jawa tahun 2019 terbesar adalah di Provinsi Jawa Barat yaitu 8.724 perusahaan, sekaligus penyerapan tenaga kerja terbesar adalah di Provinsi Jawa

Barat yaitu 2.104.462 orang tenaga kerja. (Gambar 2).

Gambar 2
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang (unit) dan Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor IBS Tahun 2019



Sumber : BPS, 2019 (data diolah)

Banyak industri manufaktur yang terdapat di pulau Jawa. 5 (lima) daerah industri di Indonesia yang tersebar di pulau Jawa diantaranya: 1. Karawang, Jawa Barat; 2. Bekasi, Jawa Barat; 3. Pulogadung, Jakarta; 4. Surabaya, Jawa Timur; dan 5. Pasuruan, Jawa Timur.

2. Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha yang Merupakan Sektor Basis di Pulau Jawa (Selain Industri Pengolahan)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 terjadi di

hampir seluruh lapangan usaha, hanya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2021. Hal ini memberikan sinyal bahwa terjadi pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; diikuti Informasi dan Komunikasi; dan Pengadaan Listrik dan Gas. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berikut PDB menurut lapangan usaha tahun 2021:

Tabel 3
PDB di Indonesia Tahun 2021

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)
	Harga Konstan 2010
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.403.710
B. Pertambangan dan Penggalian	822.100
C. Industri Pengolahan	2.284.822
D. Pengadaan Listrik dan Gas	114.861
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.919
F. Konstruksi	1.102.518
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.450.226
H. Transportasi dan Pergudangan	406.188
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	310.755
J. Informasi dan Komunikasi	696.460

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)
	Harga Konstan 2010
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	464.639
L. Real Estate	333.283
M,N. Jasa Perusahaan	197.107
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	364.233
P. Jasa Pendidikan	350.655
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	157.105
R,S,T,U. Jasa lainnya	200.773
PRODUK DOMESTIK BRUTO	11.118.869

Pulau Jawa yang masih merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia terdapat lapangan usaha yang begitu banyak. Dari sekian sektor tersebut, sektor manakah yang masih merupakan sektor basis di setiap provinsi di pulau Jawa. Enam (6) provinsi yang ada di Indonesia tersebut yaitu: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa

Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Berikut PDRB berdasarkan harga konstan 2010 pada provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2021:

Tabel 4
PDRB pulau Jawa di Indonesia Tahun 2021

PDRB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] PDRB Seri 2010 (Milyar Rupiah)					
	Harga Konstan 2010					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1463	108406	127129	8584	170558	25417
B. Pertambangan dan Penggalan	2538	23966	22326	493	77267	2657
C. Industri Pengolahan	216033	638689	333157	12670	504864	154793
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4362	5543	1171	167	4711	4321
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	773	1419	745	111	1761	494

PDRB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] PDRB Seri 2010 (Milyar Rupiah)					
	Harga Konstan 2010					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
F. Konstruksi	207716	126767	106701	10679	152417	49562
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	285547	221203	147313	8379	312382	61595
H. Transportasi dan Pergudangan	69263	67981	24342	4468	44547	22055
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83393	38620	32595	9131	86108	11333
J. Informasi dan Komunikasi	245177	91882	62289	16330	113956	31372
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	208004	39014	27556	3819	42135	14249

PDRB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] PDRB Seri 2010 (Milyar Rupiah)					
	Harga Konstan 2010					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
L. Real Estate	120507	22033	19133	7638	30241	42635
M,N. Jasa Perusahaan	151567	6077	3817	1126	12466	4565
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	64608	26178	24529	7282	34948	7990
P. Jasa Pendidikan	87887	44988	38975	10033	46335	14154
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39681	12666	9472	3442	12847	6735
R,S,T,U. Jasa lainnya	67781	32305	16069	2956	21567	6813
PRODUK DOMESTIK BRUTO	1856301	1507746	997317	107309	1669116	460740

Dari data pada Tabel 4 diatas, maka dapat dicari sektor basis dari beberapa sektor menurut lapangan usaha, disamping industri pengolahan yang sudah terbukti paling dominan mendorong pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Sektor basis sendiri dapat diartikan sebagai sektor ekonomi

yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar luar daerah. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan.

Tabel 5
Hasil Perhitungan *Location Quotient (LQ)* Rata-rata
Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021

Lapangan Usaha	Nilai Location Quotient (LQ)					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.01 (nb)	0.57 (nb)	1.01 (b)	0.63 (nb)	0.81 (nb)	0.44 (nb)
B. Pertambangan dan Penggalian	0.02 (nb)	0.21 (nb)	0.30 (nb)	0.06 (nb)	0.63 (nb)	0.08 (nb)
C. Industri Pengolahan	0.57 (nb)	2.06 (b)	1.63 (b)	0.57 (nb)	1.47 (b)	1.63 (b)
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.23 (nb)	0.36 (nb)	0.11 (nb)	0.15 (nb)	0.27 (nb)	0.91 (nb)
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.47 (nb)	1.05 (b)	0.84 (nb)	1.16 (b)	1.18 (b)	1.20 (b)

Lapangan Usaha	Nilai Location Quotient (LQ)					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
F. Konstruksi	1.13 (b)	0.85 (nb)	1.08 (b)	1.00 (b)	0.92 (nb)	1.08 (b)
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.18 (b)	1.12 (b)	1.13 (b)	0.60 (nb)	1.43 (b)	1.02 (b)
H. Transportasi dan Pergudangan	1.02 (b)	1.23 (b)	0.67 (nb)	1.14 (b)	0.73 (nb)	1.31 (b)
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.61 (b)	0.92 (nb)	1.17 (b)	3.04 (b)	1.85 (b)	0.88 (nb)
J. Informasi dan Komunikasi	2.11 (b)	0.97 (nb)	1.00 (b)	2.43 (b)	1.09 (b)	1.09 (b)
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.68 (b)	0.62 (nb)	0.66 (nb)	0.85 (nb)	0.60 (nb)	0.74 (nb)
L. Real Estate	2.17 (b)	0.49 (nb)	0.64 (nb)	2.37 (b)	0.60 (nb)	3.09 (b)
M,N. Jasa Perusahaan	4.61	0.23	0.22	0.59	0.42	0.56

Lapangan Usaha	Nilai Location Quotient (LQ)					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
	(b)	(nb)	(nb)	(nb)	(nb)	(nb)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.06 (b)	0.53 (nb)	0.75 (nb)	2.07 (b)	0.64 (nb)	0.53 (nb)
P. Jasa Pendidikan	1.50 (b)	0.95 (nb)	1.24 (b)	2.96 (b)	0.88 (nb)	0.97 (nb)
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.51 (b)	0.59 (nb)	0.67 (nb)	2.27 (b)	0.54 (nb)	1.03 (b)
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.02 (b)	1.19 (b)	0.89 (nb)	1.53 (b)	0.72 (nb)	0.82 (nb)

Sumber : Data BPS, diolah

Keterangan : (b) : sektor basis (warna abu)

(nb) : sektor non basis (warna kuning)

Hasil perhitungan *Location Quotient (LQ)* pulau Jawa Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5. Pada tabel tersebut, diketahui bahwa sektor industri pengolahan di pulau Jawa menjadi sektor basis yang paling dominan. Hal ini menunjukkan industri pengolahan adalah sektor basis yang menggambarkan bahwa industri ini memiliki kekuatan ekonomi yang baik dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Sektor ini, selain bisa untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya, bahkan berpotensi untuk ekspor. Sektor ini sangat potensial

dimana sektor ini bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Sektor basis yang paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sektor jasa perusahaan, dengan nilai LQ sebesar 4,61. Sedangkan sektor non basis yang paling rendah masih terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan nilai LQ sebesar 0,01.

Berikut hasil 3 (tiga) besar sektor basis tertinggi dari setiap provinsi yang ada di Pulau Jawa:

Tabel 6
3 (Tiga) Sektor Basis Tertinggi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021

Provinsi	No. 1	No. 2	No.3
DKI Jakarta	Jasa Perusahaan 4,61	Jasa Keuangan dan Asuransi 2,68	Real Estate 2,17
Jawa Barat	Industri Pengolahan 2,06	Transportasi dan Pergudangan 1,23	Jasa lainnya 1,19
Jawa Tengah	Industri Pengolahan 1,63	Jasa Pendidikan 1,24	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,17
DI Yogyakarta	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,04	Jasa Pendidikan 2,96	Informasi dan Komunikasi 2,43
Jawa Timur	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,85	Industri Pengolahan 1,47	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,43
Banten	Real Estate 3,09	Industri Pengolahan 1,63	Transportasi dan Pergudangan 1,31

Sumber : Data BPS, diolah

Dari Tabel 6 tersebut, sektor basis tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, serta real estate. Sektor basis tertinggi di Provinsi Jawa Barat yaitu industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya. Sektor basis tertinggi di Provinsi Jawa Tengah yaitu industri pengolahan, jasa pendidikan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor basis tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, serta

informasi dan komunikasi. Sektor basis tertinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor. Terakhir, Sektor basis tertinggi di Provinsi Banten yaitu real estate, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan.

Berikut hasil 3 (tiga) besar sektor nonbasis tertinggi dari setiap provinsi yang ada di Pulau Jawa:

Tabel 7
3 (Tiga) Sektor Non Basis Tertinggi
Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021

Provinsi	No. 1	No. 2	No.3
DKI Jakarta	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,01	Pertambangan dan Penggalian 0,02	Pengadaan Listrik dan Gas 0,23
Jawa Barat	Pertambangan dan Penggalian 0,21	Jasa Perusahaan 0,23	Pengadaan Listrik dan Gas 0,36
Jawa Tengah	Pengadaan Listrik dan Gas 0,11	Jasa Perusahaan 0,22	Pertambangan dan Penggalian 0,30
DI Yogyakarta	Pertambangan dan Penggalian 0,06	Pengadaan Listrik dan Gas 0,15	Industri Pengolahan 0,57

Provinsi	No. 1	No. 2	No.3
Jawa Timur	Pengadaan Listrik dan Gas 0,27	Jasa Perusahaan 0,42	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,54
Banten	Pertambangan dan Penggalian 0,08	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,44	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,53

Sumber : Data BPS, diolah

Dari Tabel 7 tersebut, sektor non basis tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik dan gas. Sektor non basis tertinggi di Provinsi Jawa Barat yaitu pertambangan dan penggalian, jasa perusahaan, serta pengadaan listrik dan gas. Sektor non basis tertinggi di Provinsi Jawa Tengah yaitu pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor non basis tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta yaitu pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, serta industri pengolahan. Sektor non basis tertinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Terakhir sektor non basis tertinggi di Provinsi Banten yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

3. Kontribusi Volume Ekspor Pulau Jawa terhadap Nilai Ekspor di Indonesia

Dengan demikian porsi kinerja perdagangan internasional Indonesia kembali mencatatkan surplus di tahun 2021. Neraca perdagangan Indonesia di sepanjang tahun 2021 mengalami surplus hingga US\$ 35,42 miliar. Angka tersebut naik 63,80% dibanding tahun sebelumnya dan menjadi surplus tertinggi dalam lima belas tahun terakhir. Namun, neraca perdagangan migas mengalami defisit hingga US\$ 13,28 miliar. Defisit neraca perdagangan migas tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia memang masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. Naiknya harga komoditas migas berpengaruh pada meningkatnya defisit neraca perdagangan migas tahun 2021.

Kinerja ekspor yang dilakukan setiap provinsi di Pulau Jawa, terutama pengolahan non migas sangat tinggi dibandingkan pengolahan migas. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Volume Ekspor Tahunan Indonesia
Menurut Sektor (Ribuan Ton), 2021-2022

Komponen Ekspor Impor	Volume Ekspor Migas-NonMigas (Ribuan Ton)	
	2021	Sampai September 2022
Migas	26890.2	18392.1
Non Migas	594777.6	456044.7
Jumlah	621667.8	474436.8

Sumber : Data BPS

Pada tahun 2021, dapat terlihat bahwa menurut sektor, industri pengolahan non migas berkontribusi sebesar 95,67%. Jauh berbeda dengan industri pengolahan migas yang hanya berkontribusi sebesar 4,33%. Sedangkan pada bulan September tahun 2022, industri pengolahan non migas kontribusinya meningkat menjadi sebesar 96,12%, dan untuk industri migas kontribusinya menurun menjadi sebesar 3,88%.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada beberapa dekade sebelumnya, struktur perekonomian pulau Jawa

masih bertumpu pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, namun kini telah bergeser ke kategori ekonomi lainnya. Pada Tahun 2021, peranan terbesar perekonomian yang ditunjukkan oleh peranan PDRB atas Dasar Harga Konstan disumbangkan cukup tinggi oleh sektor Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Industri Pengolahan/ manufaktur, dan real estate. Dengan berkembangnya sektor-sektor tersebut, diharapkan bersinergi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Harapan selanjutnya, sektor-sektor tersebut menjadi pemicu agar aktivitas di sektor-sektor lain turut meningkat.

2. Sektor industri pengolahan di pulau Jawa memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan, terutama industri pengolahan non migas. Karena industri ini memiliki

- kriteria memiliki pertumbuhan yang baik di tingkat provinsi di pulau Jawa.
3. Volume ekspor industri pengolahan non migas tahun 2021 memiliki kontribusi yang cukup besar, mendominasi lebih dari 90%. Tentu saja itu sangat berperan besar dalam memperbaiki perekonomian Indonesia pasca Covid-19.
 4. Sinergitas potensi ekonomi di pulau Jawa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan dan mempertahankan kinerja sektor jasa perusahaan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta *real estate*.
 5. Sinergitas peningkatan sektor ekonomi di pulau Jawa dapat dilakukan dengan cara mengembangkan inovasi agar sektor tersebut mengalami perbaikan, diantaranya untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalan; serta pengadaan listrik dan gas. Untuk sektor pertambangan dan penggalan memang secara struktur geografis di pulau Jawa tidak menunjang untuk menjadi potensi ekonomi. Tapi harapannya untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta pengadaan listrik dan gas dapat ditingkatkan melalui inovasi dari pemerintahan terkait.

F. Rekomendasi Kebijakan

Mengkaji beberapa kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disebutkan implikasi kebijakan dari data-data atau kejadian yang ada, yaitu:

1. Berdasarkan pemahaman terhadap potensi ekonomi yang dimiliki pulau Jawa, maka pemerintah daerah di setiap provinsi diharapkan merumuskan strategi pengembangan daerah yang paling menguntungkan untuk diterapkan di masa mendatang, yakni dengan mengutamakan

kegiatan unggulan berupa jasa perusahaan di Provinsi DKI Jakarta, industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, serta *real estate* di Provinsi Banten. Namun dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terpusat di Pulau Jawa melalui sektor-sektor basis hendaknya tidak mengabaikan sektor-sektor non basis, karena dengan meningkatkan peran dari sektor non basis diharapkan sektor tersebut dapat tumbuh menjadi sektor basis dan pada akhirnya semua sektor ekonomi dapat secara bersama-sama bersinergi mendukung peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Pada Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sektor basis yaitu industri pengolahan, diharapkan kepada pemerintah provinsi tersebut mulai memperhatikan kualitas dan faktor-faktor penunjang agar perkembangan industri ini tidak dijadikan suatu alat untuk mengambil keuntungan salah satu pihak tetapi seluruh masyarakat yang terlibat di sekitarnya.
3. Untuk Provinsi Banten, perkembangan *real estate* diharapkan mampu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman agar tidak mengganggu stabilitas geografis daerah setempat.
4. Pemerintahan provinsi di pulau Jawa pada saat mengembangkan sektor basis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hendaknya juga tidak mengabaikan peran sektor non basis yang tergolong non potensial. Karena dengan pengembangan sektor potensial diharapkan akan dapat merangsang pertumbuhan sektor non potensial

sehingga menjadi sektor potensial pada akhirnya semua sektor ekonomi bersama-sama mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah analisis.

5. Adanya peran serta pemerintah provinsi dan masyarakat daerah dalam membuat inisiatif untuk pengadaan kawasan terpadu guna pengembangan sektor potensial yang dapat mendukung pengembangan setiap provinsi di pulau Jawa dan juga Kabupaten-Kabupaten ataupun Kota-Kota yang ada di Provinsi yang ada di pulau Jawa.
6. Untuk mempercepat pembangunan nasional, perlu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten khususnya tenaga kerja sektor non basis, sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan tentang pembangunan tenaga kerja non basis tersebut. Pembangunan tenaga kerja non basis dilakukan salah satunya melalui pendidikan berbasis kompetensi.
7. Pemerintah provinsi di pulau Jawa, harus mulai mengembangkan kembali sektor non basis. Diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta. Sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Banten. Terakhir, sektor pengadaan listrik dan gas di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

Daftar Pustaka

Buku

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Statistik Industri Besar dan Sedang Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2020). Perkembangan Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Jawa Barat. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2022). Laporan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2022). Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2020). Laporan Perekonomian Indonesia: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat: Menjaga Stabilitas dan Momentum Pemulihan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global. Bandung: Bank Indonesia.
- Tarigan, R., (2014), Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Maret 2014, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Jurnal

- Adi, L. (2017). Analisis LQ, Shift Share, dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2017. Kediri: Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri.
- Hutapea. A. et al (2020). Analisis Sektor Basis dan Non Basis Serta Daya Saing Ekonomi dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan. Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 20 No. 03 Tahun 2020.

Jumiyanti, K.R. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. Gorontalo: Gorontalo Development Review.

Masruri, F.A. et al. (2021). Analisis Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bandung: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. XII No. 1.

Kebijakan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025

Website

Pratiwi, Y. R. "Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-AkibatPandemi-Covid-19.html>, diakses 22 Juni 2022.